

Seleksi di DPR Menuai Kritik

Proses seleksi di DPR membuka peluang adanya titipan bersifat politis yang cenderung saling mengamankan.

AM AHL S AZWAR

UJI kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sejumlah lembaga negara oleh DPR menuai kritik. Pasalnya, proses uji kelayakan itu tidak memiliki tata krama dan rawan politisasi.

"Perlu ada tata krama yang baku mengenai bagaimana *fit and proper test* dilakukan agar tidak secara personal menyering orang yang tengah diuji. Perlu juga aturan mengenai siapa anggota parlemen yang pantas melakukan *fit and proper test*," kata anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winarta di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, proses *fit and proper test* kerap mempertontonkan sikap tendensius dan mempermalukan anggota dewan. "Jangan sampai seorang profesor yang ikut seleksi calon hakim agung diseleksi lulusan S-1. Sesuai bidangnya lah. Tidak usah semua anggota Komisi III DPR ramai-ramai menyeleksi calon pemimpin KPK misalnya. Kalau begitu, mereka bertanya suka tidak terbatas dan ngawur," ujar Frans.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat, DPR tidak perlu kembali ikut serta menyeleksi calon komisioner di lembaga antisuap itu.

Menurut dia, pada tahun-tahun mendatang seleksi se-

baiknya dilakukan lembaga profesional dan independen yang sudah teruji sekaligus nonpartisan. "Dengan demikian, DPR tidak terus-menerus kena stigma melakukan politisasi di dalam pemilihan calon pimpinan KPK," kata dia.

Busyro menilai DPR sebaiknya mengawasi saja lembaga independen yang nonpartisan dalam menyeleksi calon komisioner.

Komisi III DPR, dalam waktu dekat, akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK. Padahal, sejumlah anggota Komisi III DPR saat ini juga mewacanakan pembubaran KPK.

Wakil Ketua KPK M Jasim juga menilai DPR sebaiknya tidak terlibat dalam seleksi KPK. Pasalnya, uji kelayakan dan kepatutan di DPR membuka peluang adanya titipan bersifat politis yang cenderung saling mengamankan.

"Seharusnya seperti itu supaya pimpinan KPK itu tidak ada titipan politik yang sifatnya saling mengamankan," ujar Jasim.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa setuju untuk tidak melibatkan DPR dalam seleksi pimpinan KPK.

"Kalau di panitia seleksi (panel), sebagian besar independen dan sedapat mungkin menangkap aspirasi masyarakat. Sebetulnya hasil dari panel KPK

sudah sangat tepat dan baik," ujar dia.

Di lain hal, proses di DPR, menurut dia, lebih kental nuansa politik. "Kalau dibawa ke DPR, teman-teman DPR akan lebih membawa banyak kriteria politik ketimbang aspirasi masyarakat," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, *fit and proper test* di DPR tidak memiliki standar baku.

Tidak sehat

Anggota serta pimpinan DPR seakan kompak menepis anggapan itu. Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso menganggap wacana untuk tidak melibatkan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan harus dihindari.

"Pikiran semacam itu pikiran yang kurang sehat harus dihindari. Saya berpendapat, tidak sehat membangun sistem demokrasi ke depan dan DPR tetap harus ada," kata Priyo.

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan proses di DPR tetap ada selama belum ada revisi undang-undang (UU). "Ya tentu bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Yang penting, kalau DPR dan pemerintah setuju revisi, ya setuju," tandasnya.

Anggota Komisi III DPR dari F-PD Saan Mustopa juga membantah seleksi di DPR lebih kental pertimbangan politis. "Yang kami pilih yang berintegritas," ujarnya. (Wta/* / Ant/P-1)

amahl@mediaindonesia.com